

**UPAYA UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN
(UNAMA) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI
AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023**

Oleh: Khairul Insan

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan dari 2021 hingga 2023, terutama setelah kembalinya Taliban berkuasa yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan bergerak, dan partisipasi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi UNAMA, laporan PBB, serta sumber berita terkait. Kerangka teori yang digunakan yaitu perspektif pluralisme, teori organisasi internasional Clive Archer, dan analisis Joshua S. Goldstein, hasil penelitian menunjukkan UNAMA berhasil mendokumentasikan, melaporkan, dan mengadvokasi pelanggaran hak perempuan termasuk penyiksaan, pembatasan kebebasan berkumpul, dan diskriminasi di sistem peradilan. Meskipun melakukan advokasi melalui dialog dengan Taliban, pelaporan kepada Dewan Keamanan PBB, serta koordinasi dengan aktor internasional untuk tekanan diplomatik dan bantuan kemanusiaan, UNAMA menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan mandat penegakan hukum dan resistensi Taliban terhadap norma internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan internasional yang konsisten untuk memastikan penegakan hak perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Organisasi Internasional, Pluralisme, Taliban, UNAMA

ABSTRACT

This study examines the efforts of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) to safeguard women's rights in Afghanistan from 2021 to 2023, particularly after the Taliban's return to power, which has curtailed women's access to education, employment, health care, freedom of movement,

and political participation. Employing a qualitative descriptive method that combines library research with an analysis of official UNAMA documents, UN reports, and relevant news sources, the study draws on pluralist perspectives, Clive Archer's theory of international organizations, and Joshua S. Goldstein's level-of-analysis framework. The findings show that UNAMA has successfully documented, reported, and advocated against abuses of women's rights, including torture, restrictions on freedom of assembly, and discrimination within the judicial system. Despite advocacy through dialogue with the Taliban, reporting to the UN Security Council, and coordination with international actors for diplomatic pressure and humanitarian assistance, UNAMA faces significant challenges, such as limited enforcement authority and Taliban resistance to international norms. The research underscores the necessity of sustained and consistent international support to ensure the protection of women's rights in Afghanistan.

Keywords: Women's Rights, International Organizations, Pluralism, Taliban, UNAMA

PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan negara multi etnis yang terletak begitu strategis di bagian selatan benua Asia sekaligus menjadi penghubung negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan.¹ Namun, kondisi geografis yang strategis serta keanekaragaman suku dan budaya tidak menjadikan Afghanistan sebagai negara yang damai. Kehidupan masyarakat Afghanistan silih berganti dilanda konflik internal, perang saudara, serta invasi dan pendudukan asing.

Taliban merupakan kelompok pelajar yang muncul pada tahun 1994 pasca keruntuhan rezim komunis Uni

Soviet di Afghanistan. Setelah Uni Soviet menyatakan untuk menarik mundur seluruh pasukannya, kelompok Mujahidin yang awalnya bersatu mengusir invasi asing justru bertikai karena memperebutkan kekuasaan di Afghanistan. Melihat kondisi negaranya yang tidak menentu, Taliban dibawah kepemimpinan Mullah Mohammad Omar memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai dan berhasil merebut beberapa wilayah strategis di Afghanistan.²

Rentang tahun 1996-2001, menjadi masa kejayaan Taliban, dimana mereka berhasil mendominasi dan mengontrol wilayah Afghanistan termasuk ibu kota Kabul dan kota-

¹ Mohammad Ali et al., "Afghanistan," *Encyclopedia Britannica*, accessed January 15, 2025, <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>.

² Felix Kuehn, "Taliban History of War and Peace in Afghanistan," *Accord: International Review of Peace Initiatives* 27 (2018).

kota penting lainnya.³ Namun, kekuasaan Taliban tidak bertahan lama, pada 11 September 2001, terjadi serangan teroris paling berani dalam sejarah Amerika Serikat (AS).⁴ Menindaklanjuti kejadian ini, AS kemudian meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden yang dinilai sebagai otak dari kejadian tersebut dan dipercaya berada di Afghanistan, akan tetapi Taliban menolaknya.

AS kemudian melakukan operasi militer di Afghanistan yang didasari oleh perlawanan *Global War on Terrorism* (GWOT) dan untuk mencegah Afghanistan menjadi sarang teroris.⁵ Dalam waktu 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2021, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari Afghanistan secara total, dan menandakan berakhirnya dua dekade demokratisasi negara adidaya tersebut di Afghanistan.⁶

³ Valeri Modebadze, "Afghanistan under Taliban: A New Regime Poses a Threat to International Stability," *Journal of Liberty and International Affairs* 8, no. 1 (2022): 277–291.

⁴ History, "September 11 Attacks," *History*, accessed January 16, 2025, <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.

⁵ Selli Nirsina Faradila, "Usai Tragedi 9/11, Mengapa AS Menyerbu Afghanistan?," *11 September 2021*, accessed September 15, 2024, <https://www.zenius.net/blog/tragedi-9-11-terorisme>.

⁶ Poltak Partogi Nainggolan, "Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik*

Kepergian AS ini kemudian dimanfaatkan Taliban untuk kembali menguasai Afghanistan. Taliban secara cepat menggulingkan pemerintahan demokratis Afghanistan dan memecah belah stabilitas pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani.⁷ Melalui beberapa tindak okupasi di kota-kota strategis di Afghanistan mulai dari Kunduz, Kandahar, dan Mazhar-i-Sharif, dan dalam satu hari saja Ibukota Kabul berhasil direbut.⁸

Pada 15 Agustus 2021 Taliban telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan. Zahirullah Majid, juru bicara Taliban saat itu menyatakan bahwa Taliban akan menerapkan pemerintahan yang moderat kali ini, sehingga perempuan tetap bisa aktif dalam lingkungan masyarakat, di bawah naungan kerangka ajaran Islam.⁹ Namun faktanya, bukannya Taliban menerapkan kebijakan yang lebih moderat, mereka justru mengulang sejarah.¹⁰

Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 4, no. 1 (2016).

⁷ Modebadze, "Afghanistan under Taliban: A New Regime Poses a Threat to International Stability."

⁸ Ibid.

⁹ Poltak Partogi Nainggolan, "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan," *Info Singkat* 13, no. 16 (2021): 7–12, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf.

¹⁰ Michaela Cavanagh, "Fact Check: Have Taliban Kept Their Promises?," *DW*, last

Kebijakan Taliban yang diterapkan pada kaum perempuan sangat membatasi ruang gerak mereka untuk dapat menggunakan haknya secara utuh. Perempuan dipersulit mendapatkan akses pendidikan, dilarang bekerja, pembatasan pada aspek kesehatan, akses sumber daya sosial dan budaya.¹¹ Pembatasan terhadap hak asasi kaum perempuan ini tentu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan juga prinsip non-diskriminasi. Sehingga kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan membawa banyak kekhawatiran bagi para masyarakat sipil khususnya bagi perempuan.

Menanggapi konflik yang terus berlanjut ini, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA). UNAMA merupakan misi bantuan kemanusiaan yang betugas untuk menciptakan stabilitas politik dan hak asasi manusia di Afghanistan. UNAMA dibentuk pada 28 Maret 2002 melalui resolusi PBB 1401 untuk mendukung perjanjian Bonn, dan atas permintaan pemerintah Afghanistan untuk menangani konflik yang berlarut-

larut terjadi di Afghanistan sehingga mengancam keamanan masyarakat sipil.¹²

Prioritas UNAMA terkait isu hak perempuan mengalami penyesuaian dari pendekatan pemberdayaan dan partisipasi politik menjadi lebih fokus pada upaya mempertahankan hak-hak dasar perempuan yang terancam oleh kebijakan Taliban. PBB mengharapkan UNAMA dapat bekerjasama dengan masyarakat Afghanistan, pemangku kebijakan, dan aktor internasional yang relevan dalam memastikan memberi perlindungan pada kelangsungan hak asasi manusia, khususnya hak para perempuan Afghanistan yang terancam oleh kebijakan Taliban yang represif.¹³ Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisis mendalam mengenai bagaimana upaya UNAMA dalam memperjuangkan hak perempuan di Afghanistan tahun 2021-2023.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Perspektif pluralisme menekankan bahwa sistem internasional tidak hanya terpaut pada aktor negara atau *state actor* namun juga aktor non-negara atau *non-state actor*. Pluralisme berfokus pada bagaimana

modified 2022, accessed September 5, 2024, <https://www.dw.com/en/fact-check-have-the-taliban-kept-their-promises/a-62649985>.

¹¹ Tsubitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo, "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 269–278.

¹² UNAMA, "About United Nations Assistance in Afghanistan," *UNAMA*, accessed January 17, 2025, <https://unama.unmissions.org/about>.

¹³ UNAMA, "Resolution 2596," *United Nations Security Council* 2596, no. March (2021): 497–505.

melihat cara pandang isu kalangan internasional, yang dimana hubungan internasional juga memiliki dimensi yang sangat luas jangkauannya dan sangat beragam. Pluralisme menekankan kehadiran banyak aktor dalam sistem internasional, lebih dari sekadar negara.¹⁴

Pluralisme relevan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, termasuk bagaimana menghargai hak-hak perempuan. UNAMA bekerja dalam kerangka norma internasional yang perlindungan hak-hak perempuan, di tengah kondisi represif setelah Taliban kembali berkuasa. Hal tersebut menurut pandangan Pluralisme tidak dapat dielakkan dikarenakan hal tersebut merupakan kepentingan dalam mencapai suatu kepentingan masyarakat dunia sebagai entitas bersama dan semua aktor memiliki peran penting dalam pendistribusian *power* sesuai dengan peranan masing-masing untuk mencapai perdamaian.

Hubungan antara pluralisme dan peran UNAMA dalam memperjuangkan hak perempuan di Afghanistan, ditandai dengan perlunya pendekatan multi-aktor untuk mengatasi perlakuan

penindasan atau kesenjangan terhadap perempuan dan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam lingkungan sosial dan politik. Perspektif pluralisme menekankan pentingnya mengakui keberagaman dalam upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan, sementara peran UNAMA adalah untuk mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya tersebut secara inklusif dan berkelanjutan dengan berperan sebagai mediator, penyedia sumber daya, sekaligus advokat dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan Afghanistan tidak tertindas dan bebas dari diskriminasi.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai institusi yang dibentuk atas kesepakatan antara dua anggota atau lebih, baik itu pemerintah maupun non pemerintahan dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan terikat pada aturan formal serta berkelanjutan.¹⁵

Clive Archer dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat dua jenis organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya, yaitu IGO (*Intergovernmental Organization*) dan INGO (*International Non-Governmental*

¹⁴ Muhadi Sugiono and Siti Daulah Khoiriati, "Pluralitas Teoritis Dan Pluralisme Dalam Hubungan Internasional" (n.d.).

¹⁵ John Baylis, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford university press, USA, 2020).

Organization). IGO adalah organisasi internasional yang hanya menerima negara-negara sebagai anggotanya dan memiliki struktur keputusan yang dikelola oleh perwakilan pemerintahan. Sementara itu, INGO adalah organisasi internasional yang membuka keanggotaannya bagi aktor-aktor transnasional non-negara.¹⁶

Lebih lanjut Archer menjelaskan bahwa Organisasi Internasional memiliki tiga peran utama. Peran-peran tersebut adalah sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai Instrumen, organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri dari sebuah negara. Hal ini biasanya terjadi pada IGO yang mana tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dibatasi oleh negara yang tergabung didalamnya. Sedangkan dalam INGO, tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dipengaruhi oleh anggotanya seperti kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok keagamaan.¹⁷

Sebagai Arena, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena atau tempat untuk bertemunya anggota-anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang. Organisasi internasional dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berdebat,

bekerjasama, atau bahkan saling berbeda pendapat.¹⁸ Sebagai aktor independen, hal ini berarti organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Organisasi Internasional dapat mengambil tindakan langsung untuk mengatasi sebuah permasalahan, seperti memberikan bantuan langsung kepada korban perang.¹⁹

Berdasarkan teori Clive Archer, UNAMA dapat berperan sebagai instrumen, karena menjalankan mandat PBB di Afghanistan. Sebagai arena, karena menyediakan tempat untuk diskusi dan negosiasi antara aktor-aktor yang berkepentingan, dan sebagai aktor independen, karena mampu bertindak atas inisiatif sendiri dalam menjalankan misi politik dan kemanusiaannya di Afghanistan, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan. Kembalinya Taliban sebagai suatu tantangan di Afghanistan, menimbulkan situasi ketegangan antara Afghanistan dan beberapa negara kembali meningkat. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan signifikansi dan berbagai peran penting dari UNAMA sesuai dengan dinamika situasi di Afghanistan. Oleh sebab itu, teori organisasi internasional dianggap mampu digunakan sebagai alat bantu untuk menjawab permasalahan di atas.

¹⁶ Clive Archer, *International Organisations* (Routledge, 2002).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Level Analysis

Berdasarkan penjelasan perbedaan tingkat analisis yang dipaparkan oleh Joshua S. Goldstein, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat analisis domestik (*domestic level analysis*). Level analisis ini dijelaskan sebagai sebuah tingkat analisis yang berfokus pada pengaruh yang diberikan oleh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh suatu negara.²⁰

Dalam penelitian ini, level analisis domestik adalah pilihan yang tepat. Level ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana UNAMA memengaruhi kebijakan Taliban yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dengan menggunakan level analisis domestik, penelitian ini dapat mengeksplorasi dampak ideologi dan norma sosial yang diterapkan Taliban terhadap upaya perlindungan hak-hak perempuan yang dilakukan oleh UNAMA. Lebih jauh, analisis ini juga dapat menjelaskan interaksi antara aktor domestik dan UNAMA, serta bagaimana dinamika internal Afghanistan membentuk efektivitas misi kemanusiaan yang diusung oleh PBB.

²⁰ Joshua S Goldstein, *International Relations: Eight Edition* (Pearson Education., 2008).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis bahasan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berisi mengenai penjelasan dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari tulisan yang telah dipublikasikan sebelumnya serta data dari website resmi UNAMA. Metode penelitian kualitatif dimulai dari asumsi dengan menggunakan teori yang bertujuan untuk menjelaskan isu bahasan utama. Metode kualitatif bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dalam menganalisis fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian yakni deskriptif akan membantu untuk memberikan gambaran melalui variabel yang berkaitan dengan bahasan.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perempuan Afghanistan Sejak Taliban Kembali Berkuasa

Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan berbagai kebijakan yang secara sistematis membatasi hak-hak perempuan Afghanistan. Pembatasan ini mencakup hak perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan, hak perempuan

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2004).

dalam bekerja, hak perempuan dalam politik dan publik, hak perempuan dalam bergerak dan berpakaian, hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan, serta hak perempuan dalam kebebasan dan berekspresi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban ini tentu memiliki dampak yang besar terhadap kondisi perempuan Afghanistan.

Berdasarkan laporan yang berjudul “*Situation of Afghan Women, Summary Report of Country-wide Women’s Consultations*” yang dirilis pada Juni hingga Desember 2023, sebagai respons terhadap memburuknya kondisi hak asasi perempuan di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, khususnya setelah Taliban memberlakukan hampir 70 kebijakan dan arahan yang membatasi hak-hak dasar dan kebebasan fundamental perempuan.²² Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), UN Women, dan *International Organization for Migration* (IOM)²³ Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran langsung dari

perempuan Afghanistan tentang bagaimana kebijakan Taliban mempengaruhi kondisi kehidupan mereka sehari-hari, serta untuk menyampaikan suara perempuan kepada komunitas internasional untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan global yang berpihak kepada hak-hak perempuan Afghanistan.²⁴

UNAMA, UN Women, dan IOM melakukan konsultasi dan *telesurvey* secara langsung dan daring yang menjangkau perempuan di 33 dari 34 provinsi di Afghanistan. Konsultasi ini melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, pengungsi perempuan, perempuan perdesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, perempuan yang bekerja dan tidak bekerja, serta perempuan yang berbeda usia, status perkawinan, etnis, dan latar belakang pendidikan.²⁵ Temuan dari laporan ini menyatakan bahwa pembatasan pendidikan bagi perempuan di atas sekolah dasar pada September 2021 dan perluasannya ke universitas pada Desember 2022 menyebabkan bencana sosial dan ekonomi di Afghanistan.²⁶ Sebanyak 90 persen

²² UN WOMEN IOM, UNAMA, “*Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations* (December 2023),” UNAMA.

²³ UN WOMEN IOM, UNAMA, “*Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations* (June 2023),” UNAMA.

²⁴ Ibid.

²⁵ IOM, UNAMA, “*Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations* (December 2023).”

²⁶ Fazelminallah Qazizai and Daa Hadid, “Taliban Reverses Decision, barring Afghan Girls from Attending School beyond 6th Grade,” *NPR*, accessed February 11, 2025,

lebih perempuan menyampaikan bahwa pembatasan ini mendorong meningkatnya kemiskinan di keluarga mereka, menyebabkan eksploitasi anak, pernikahan anak, dan pengungsian.²⁷

Laporan ini juga menunjukkan, sebagai akibat dari larangan perempuan bekerja di LSM nasional dan internasional pada Desember 2022 dan perluasannya ke PBB pada April 2023.²⁸ Sekitar 85 persen perempuan melaporkan bahwa mereka tidak lagi dapat melakukan aktivitas ekonomi, termasuk menjalankan usaha rumahan seperti membuka salon, menjahit, atau beternak.²⁹ Bahkan beberapa perempuan mengatakan bahwa mereka terpaksa mengemis untuk menyanggah kehidupan.³⁰

Sebagai akibat dari pembatasan ini, banyak perempuan Afghanistan yang tidak lagi bekerja, kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi yang

mengkhawatirkan, serta berdampak buruk dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, memperburuk hubungan dengan anggota keluarga laki-laki, meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan memperdalam ketergantungan perempuan kepada laki-laki dalam kehidupan keluarga, serta menutup ruang bagi partisipasi ekonomi perempuan secara mandiri.³¹ Jika larangan bekerja ini masih terus berlanjut, ekonomi Afghanistan akan memburuk, dengan sekitar 96 persen perempuan berisiko jatuh dibawah garis kemiskinan.³²

Pembatasan perempuan bergerak jika tidak didampingi mahram atau saudara laki-laki juga dinilai sebagai hambatan utama. Sebanyak 21 persen perempuan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan ruang sosial karena tidak memiliki saudara laki-laki yang dapat mendampingi.³³ Akibat dari pembatasan bergerak ini, perempuan lebih banyak diam dirumah dan semakin terisolasi, sekitar 48 persen perempuan

<https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>.

²⁷ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)."

²⁸ "Afghan Women Three Years after the Taliban Takeover," *UN Women*, accessed February 13, 2025, <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-takeover>.

²⁹ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)," 3.

³⁰ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)."

³¹ UNAMA, *Human Rights Situation in Afghanistan: July - September 2023 Update*, 2023.

³² United Nations Development Programme, "AFGHANISTAN SOCIO-ECONOMIC OUTLOOK," *UNDP*.

³³ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (December 2023)."

melaporkan tidak lagi memiliki interaksi sosial dengan perempuan lain dalam jangka waktu satu bulan atau lebih.³⁴ Tingkat isolasi sosial yang tinggi ini tercatat paling parah di wilayah timur dan tenggara Afghanistan, seperti Nangarhar, Khost, dan Paktia.³⁵

Kebijakan-kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak perempuan sehingga perempuan tidak dapat bersekolah untuk belajar, tidak bisa mandiri secara ekonomi, dan tidak boleh secara bebas keluar rumah tanpa didampingi mahram menyebabkan perempuan semakin terisolasi dari kehidupan mendorong menurunnya kesehatan mental perempuan Afghanistan. Sebanyak 76 persen perempuan menyatakan bahwa kondisi kesehatan mental mereka berada dalam kategori buruk atau sangat buruk, perempuan melaporkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa mereka mengalami depresi, kecemasan, insomnia, hilang nafsu makan, perasaan tidak berdaya, serta kehilangan makna hidup.³⁶ Pembatasan mobilitas, pengucilan sosial, dan hilangnya kontrol atas hidup menyebabkan isolasi dan

³⁴ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)," 4.

³⁵ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)." 4.

³⁶ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (December 2023)," 5.

trauma psikologis mendalam. Dalam konteks ini, peran UNAMA sebagai aktor internasional yang secara konsisten mendokumentasikan dan menyuarakan kondisi tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga agar isu perempuan tetap menjadi prioritas dalam agenda global.

Keterlibatan UNAMA dengan Taliban dalam Memperjuangkan Hak Perempuan Afghanistan

Sejak September 2021, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) telah melakukan pendekatan kepada otoritas Taliban di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengadvokasikan perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan Afghanistan.³⁷ Dalam menjalankan mandatnya, UNAMA menyampaikan laporan-laporan yang kredibel mengenai berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada kementerian dan departemen terkait di bawah otoritas Taliban, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar, instrumen, dan mekanisme

³⁷ UNAMA, *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 15 Agustus 2021-15 Juni 2022*, *United Nations Assistance in Afghanistan*, 2022.

perlindungan hak asasi manusia internasional.³⁸

Pada tingkat pusat, UNAMA menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Intelijen (*Istikhbarat*), Kementerian Penyebaran Kebaikan dan Pencegahan Kemungkaran (*Amr-bil-Ma'roof wa Nahi 'anil Munkar*), Kejaksaan Agung, serta Kantor Administrasi Lembaga Perasyarakatan atau *Office of Prisons Administration*.³⁹ Sementara itu, pada tingkat provinsi dan kabupaten, UNAMA turut menjalin hubungan kerja sama dengan pejabat seperti gubernur, kepala departemen, aparat kepolisian, petugas lembaga perasyarakatan, serta aktor-aktor dalam sistem peradilan.⁴⁰

UNAMA sebagai representasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk memastikan penegakan hak asasi manusia di Afghanistan, tidak hanya menyampaikan temuan lapangan, melainkan juga memberikan rekomendasi serta masukan kepada otoritas Taliban. Langkah ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas atas tindakan pelanggaran yang terjadi, menjamin

perlindungan terhadap hak-hak korban, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.⁴¹ Selain kegiatan advokasi, UNAMA juga menyelenggarakan berbagai sesi peningkatan kapasitas dan kesadaran mengenai hak asasi manusia yang melibatkan pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan. Kegiatan tersebut mencakup presentasi mengenai instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia, serta sesi-sesi tematik yang membahas isu-isu spesifik seperti hak-hak narapidana dan kondisi penahanan.⁴²

UNAMA mengapresiasi keterbukaan otoritas Taliban untuk berdialog terkait isu-isu hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pelaporan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Upaya komunikasi dan advokasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Afghanistan. Di samping itu, UNAMA juga secara konsisten mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan

³⁸ Ibid., 5.

³⁹ Ibid., 6.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

bergerak, dan hak-hak dasar lainnya.⁴³

Upaya UNAMA dalam Pemantauan dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) telah mengembangkan dan menerapkan sistem dokumentasi yang komprehensif dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan, dengan fokus khusus pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Dalam menjalankan tugas pemantauannya, UNAMA mensyaratkan verifikasi dari minimal tiga sumber independen untuk setiap kasus pelanggaran. Sumber-sumber ini mencakup korban, saksi mata, tenaga medis, otoritas lokal, konfirmasi dari pihak yang terlibat dalam konflik, pemuka masyarakat, serta sumber kredibel lainnya.⁴⁴ Pendekatan ini memungkinkan UNAMA untuk memperoleh data yang valid dan mendalam mengenai dampak konflik terhadap perempuan di Afghanistan.

UNAMA mencatat 217 kasus hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh Taliban sejak 15 Agustus 2021. Banyak dari kasus ini berupa

hukuman fisik yang dijatuhkan kepada individu yang dituduh melanggar nilai-nilai agama atau moral.⁴⁵ Salah satu contohnya terjadi pada 10 Oktober 2021 di Provinsi Badakhshan, ketika seorang perempuan melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudara iparnya. Bukannya mendapatkan perlindungan, keduanya justru ditangkap dan dijatuhi hukuman cambuk pada 20 Januari 2022, pihak perempuan mendapat 39 kali cambukan, sementara laki-laki 40 kali cambukan. Setelah itu, Taliban memerintahkan mereka untuk menikah.⁴⁶

UNAMA juga mencatat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum terhadap mereka yang dituduh melakukan zina atau hubungan di luar nikah. Pada 14 Februari 2022 di distrik Nusay, Badakhshan, seorang perempuan dan laki-laki dilempari batu hingga tewas di depan umum karena dituduh memiliki hubungan di luar nikah.⁴⁷ Pada 1 April 2022, di Mazar-e-Sharif, seorang perempuan dan seorang laki-laki ditemukan dalam satu mobil bersama keponakan perempuan tersebut. Setelah interogasi oleh Taliban dan tidak ditemukan hubungan pernikahan atau kekerabatan, keesokan harinya mayat keduanya ditemukan dalam keadaan telah di mutilasi, sementara

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 5.

⁴⁵ Ibid., 17.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

keponakan perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi tidak terluka.⁴⁸

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan, terutama tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan, dapat dikategorikan sebagai praktik hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat perempuan.⁴⁹ Pembunuhan semacam ini tidak hanya menghilangkan hak dasar untuk hidup, tetapi juga sering disertai dengan kekerasan fisik, penghinaan, dan perlakuan yang bertujuan memermalukan korban di hadapan publik.

Pelaporan UNAMA terhadap Pembatasan Kebebasan Berkumpul Perempuan oleh Taliban

Kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*) merupakan salah satu hak asasi sipil yang mendasar dan diakui secara universal dalam hukum internasional. Pasal 21 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengadakan

pertemuan damai, dan hak ini hanya dapat dibatasi melalui hukum jika diperlukan dalam masyarakat demokratis.⁵⁰ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berhimpun dan berasosiasi secara damai.⁵¹

Di Afghanistan, kebebasan berkumpul perempuan sangat dibatasi oleh rezim Taliban. Sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, perempuan menghadapi berbagai pembatasan serius terhadap hak untuk berkumpul secara damai. UNAMA mencatat berbagai insiden yang menunjukkan semakin sempitnya ruang bagi perempuan untuk menyuarakan hak-hak mereka di ruang publik.

Pada 6 hingga 8 Oktober 2021, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota besar seperti Kabul, Herat, Balkh, Bamyán, dan lainnya. Aksi-aksi ini sebagian besar dipimpin oleh perempuan yang menuntut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam

⁴⁸ Ibid., 18.

⁴⁹ Heather Barr, "The Taliban and the Global Backlash Against Women's Rights," *Human Rights Watch*, last modified 2024, accessed April 26, 2025, <https://www.hrw.org/news/2024/02/06/taliban-and-global-backlash-against-womens-rights#:~:text=In the last two and,of the international community has.>

⁵⁰ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1976, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

⁵¹ The General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>.

kehidupan publik.⁵² Dalam pelaporannya, UNAMA mendokumentasikan tindakan represif Taliban dalam membubarkan demonstrasi, termasuk penggunaan kekerasan fisik terhadap pengunjung rasa dan jurnalis yang meliput aksi tersebut.

Sebagai bentuk pembatasan sistematis, pada 8 September 2021, Taliban menetapkan peraturan bahwa semua aksi unjuk rasa harus mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kehakiman, serta mengharuskan pemberitahuan terlebih dahulu terkait waktu, lokasi, tujuan, dan slogan. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam demonstrasi, karena izin sering kali tidak diberikan atau digunakan sebagai alasan untuk membubarkan aksi.⁵³

Pada Februari dan Juni 2022, Taliban memperlihatkan peningkatan tindakan represif dengan menggunakan semprotan merica, alat setrum listrik, serta pengeledahan rumah dan penahanan terhadap peserta aksi.⁵⁴ UNAMA secara konsisten melaporkan praktik-praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis perempuan oleh Taliban, serta

menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya pembungkaman ruang sipil bagi perempuan.

Meskipun unjuk rasa perempuan dibatasi dan sering kali dibubarkan dengan kekerasan, UNAMA mencatat bahwa protes-protes yang mendukung kebijakan Taliban, seperti protes terhadap Amerika Serikat atau aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh perempuan pro-Taliban, justru berlangsung tanpa hambatan dari aparat keamanan.⁵⁵ Ketimpangan ini mengindikasikan praktik diskriminatif dalam penegakan hak untuk berkumpul secara damai di bawah rezim Taliban, khususnya terhadap perempuan yang menentang kebijakan pemerintah.

Upaya Advokasi dan Pemantauan UNAMA atas Pelanggaran Hak-Hak Perempuan dalam Sistem Peradilan dan Lembaga Masyarakat Taliban

Pada situasi di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, UNAMA menjalankan mandatnya melalui berbagai bentuk advokasi dan pemantauan aktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang menimpa perempuan dalam sistem peradilan dan lembaga masyarakat.

⁵² UNAMA, *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 15 Agustus 2021-15 Juni 2022*, 24.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 25.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 15 Agustus 2021, sistem peradilan dan pemasyarakatan di Afghanistan mengalami perubahan yang berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Melalui pendekatan advokasi normatif, UNAMA menyoroti bahwa kebijakan Taliban dalam sektor ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga secara sistematis mendiskriminasi perempuan.⁵⁶

Sebagai bagian dari upaya advokasinya, UNAMA melakukan kerja sama dengan Kantor Administrasi Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah kendali Taliban untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan di Faryab, Jawzjan, dan Samangan. Menanggapi desakan tersebut, pejabat provinsi dan perwakilan Kantor Administrasi Lembaga Pemasyarakatan mengunjungi lokasi, namun hasil penyelidikan menyatakan tuduhan tidak berdasar. UNAMA mencatat bahwa tidak ada mekanisme pengawasan independen yang dilibatkan, yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 35.

⁵⁷ UNAMA, "Human Rights Situation in Afghanistan: May - June 2023 Update,"

UNAMA mencatat hingga akhir Juni 2023, jumlah populasi tahanan di seluruh Afghanistan mencapai sekitar 15.000 orang, naik dari rata-rata 10.000 orang yang menjadi target penahanan sejak pertengahan 2022.⁵⁸ Di antara para tahanan tersebut terdapat perempuan dan anak perempuan yang seharusnya sudah dibebaskan, namun Taliban tetap menahan mereka karena tidak memiliki mahram atau wali laki-laki yang dapat menjemput mereka.⁵⁹ Kebijakan ini secara jelas menunjukkan pembatasan kebebasan perempuan dan ketergantungan mutlak terhadap otoritas laki-laki dalam kehidupan perempuan di bawah kekuasaan Taliban.

UNAMA juga mengadvokasi peningkatan kondisi di lembaga pemasyarakatan yang tidak memenuhi standar minimum internasional terhadap perawatan tahanan, termasuk penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang layak bagi perempuan.⁶⁰ Hal ini menyebabkan banyak perempuan mengalami kondisi yang sangat buruk di dalam penjara, baik secara fisik maupun psikologis.

Pada konferensi pers 31 Desember 2023, Kementerian Pertahanan

United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 7.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Taliban menegaskan kembali larangan terhadap penahanan ilegal, penyiksaan terhadap tersangka, dan penahanan tanpa perintah pengadilan.⁶¹ Mereka menyatakan bahwa puluhan pelanggar telah ditangkap dalam 12 bulan terakhir, dan pengadilan telah menyelesaikan 4.261 kasus yang melibatkan personel militer Taliban.⁶² Namun, tidak ada informasi yang tersedia mengenai jenis kejahatan yang dituduhkan ataupun hasil peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban.⁶³

Secara keseluruhan, sistem peradilan dan masyarakat Taliban belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi perempuan. Ketergantungan terhadap mahram, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta buruknya kondisi penahanan perempuan menunjukkan pelanggaran serius terhadap standar hak asasi manusia internasional. Perlu adanya intervensi lebih kuat dari dunia internasional untuk memastikan hak-hak perempuan Afghanistan dipenuhi dan dilindungi dalam semua aspek sistem hukum.

KESIMPULAN

⁶¹ UNAMA, "Human Rights Situation in Afghanistan: October - December 2023 Update," *United Nations Assistance Mission in Afghanistan*, 8.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UNAMA memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan selama periode kekuasaan Taliban dari 2021 hingga 2023. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan, dokumentasi, serta advokasi terhadap pelanggaran hak-hak perempuan, termasuk dalam hal kebebasan berkumpul secara damai dan keadilan dalam sistem peradilan serta lembaga masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan struktural, politik, dan keamanan, UNAMA tetap menjalankan mandatnya dengan pendekatan advokasi dan pemantauan sebagai strategi utama.

UNAMA mencatat berbagai pelanggaran serius, seperti penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan, pembatasan terhadap aksi protes damai, serta diskriminasi dalam perlakuan terhadap demonstran perempuan. Ketidakadilan juga ditemukan dalam sistem hukum, termasuk penahanan sewenang-wenang dan keterbatasan hak atas pendampingan hukum. Meski tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perubahan kebijakan Taliban, UNAMA tetap menjadi representasi penting dari tekanan dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Di tengah keterbatasan mandat dan dinamika politik yang kompleks, UNAMA hadir sebagai

simbol komitmen global dalam menolak normalisasi rezim yang menindas dan memperjuangkan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, Louis Dupree, Marvin G. Weinbaum, Nancy Hatch Dupree, Victor P. Petrov, and Frank Raymond Allchin. "Afghanistan." *Encyclopedia Britannica*. Accessed January 15, 2025. <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>.
- Archer, Clive. *International Organisations*. Routledge, 2002.
- Assembly, The General. *Universal Declaration of Human Rights*, n.d. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>.
- Barr, Heather. "The Taliban and the Global Backlash Against Women's Rights." *Human Rights Watch*. Last modified 2024. Accessed April 26, 2025. <https://www.hrw.org/news/2024/02/06/taliban-and-global-backlash-against-womens-rights>
- Baylis, John. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford university press, USA, 2020.
- Cavanagh, Michaela. "Fact Check: Have Taliban Kept Their Promises?" *DW*. Last modified 2022. Accessed September 5, 2024. <https://www.dw.com/en/fact-check-have-the-taliban-kept-their-promises/a-62649985>.
- Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, and Aji Wibowo. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 269–278.
- Europe, Council of. "UN Convention (CEDAW) - Summary." *Council of Europe*. Accessed April 30, 2025. <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw>
- Faradila, Selli Nirsina. "Usai Tragedi 9/11, Mengapa AS Menyerbu Afghanistan?" *11 September 2021*. Accessed September 15, 2024. <https://www.zenius.net/blog/tragedi-9-11-terorisme>.
- Goldstein, Joshua S. *International Relations: Eight Edition*. Pearson Education., 2008.
- History. "September 11 Attacks." *History*. Accessed January 16,

2025.
<https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.
- IOM, UNAMA, UN WOMEN. “Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations (December 2023).” *UNAMA*.
- . “Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations (June 2023).” *UNAMA*.
- Kuehn, Felix. “Taliban History of War and Peace in Afghanistan.” *Accord: International Review of Peace Initiatives* 27 (2018).
- Modebadze, Valeri. “Afghanistan under Taliban: A New Regime Poses a Threat to International Stability.” *Journal of Liberty and International Affairs* 8, no. 1 (2022): 277–291.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik.” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2016).
- . “Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan.” *Info Singkat* 13, no. 16 (2021): 7–12.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf.
- Programme, United Nations Development. “AFGHANISTAN SOCIO-ECONOMIC OUTLOOK.” *UNDP*.
- Qazizai, Fazelminallah, and Dīaa Hadid. “Taliban Reverses Decision, barring Afghan Girls from Attending School beyond 6th Grade.” *NPR*. Accessed February 11, 2025.
<https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>.
- Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, n.d.
- . *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1976.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- Sugiono, Muhadi, and Siti Daulah Khoiriati. “Pluralitas Teoritis Dan Pluralisme Dalam Hubungan Internasional” (n.d.).
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2004.

UNAMA. “About United Nations Assistance in Afghanistan.” *UNAMA*. Accessed January 17, 2025.
<https://unama.unmissions.org/about>.

———. *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 15 Agustus 2021-15 Juni 2022. United Nations Assistance in Afghanistan, 2022.*

———. *Human Rights Situation in Afghanistan: July - September 2023 Update, 2023.*

———. “Human Rights Situation in Afghanistan: May - June 2023 Update.” *United Nations Assistance Mission in Afghanistan.*

———. “Human Rights Situation in Afghanistan: October - December 2023 Update.” *United Nations Assistance Mission in Afghanistan.*

———. “Resolution 2596.” *United Nations Security Council 2596*, no. March (2021): 497–505.

“Afghan Women Three Years after the Taliban Takeover.” *UN Women*. Accessed February 13, 2025.
<https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-takeover>.